
**RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA
TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA
TAHUN 2018**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA
TAHUN 2018**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Secara nasional dalam lima tahun terakhir, konsentrasi arah pembangunan nasional telah mengalami pergeseran, yang semula dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri, kini bergeser ke arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dimungkinkan karena potensi kelautan dan perikanan memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan isu utama dalam pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Beberapa landasan tersebut antara lain; pertama, melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat tinggi. kedua; keterkaitan yang kuat antara industri yang berbasis kelautan dan industri yang berbasis ekonomi lainnya. ketiga, sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. keempat, luasnya perairan dengan jaminan keamanan yang cukup menjadi simbol bargaining politik luar negeri yang kuat. kelima, dari aspek sosial budaya orientasi dibidang kelautan dan perikanan dapat menggugah bangkitnya nilai budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat bahari.

Untuk itu dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi SDA tersebut, perlu merancang dan merumuskan arah pembangunan melalui kepekaan dan ketajaman analisa secara matang sesuai dengan potensi dan daya dukung yang tersedia. Karena itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) harus mempertimbangkan hasil analisa dan kajian yang komprehensif dari semua pihak, serta bercermin kepada arah perencanaan jangka menengah (RPJM) dan arah Perencanaan Jangka Panjang (RPJP) yang telah disusun. Hal ini menjadi penting karena RPJM dan RPJP memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kewilayahan yang disertai dengan regulasi indikatif kerangka pendanaan.

Demikian kata pengantar dari kami, semoga rumusan Rancangan Renstra ini dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara bijak dan berkesinambungan.

Kota Bima, Oktober 2018

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Bima**

**Ir. Hj. Siti Zainab
NIP. 19621013 198903 2 002**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	5
2.2 Sumberdaya Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan	36
4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43
BAB VIII PENUTUP	45

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	5
2.2 Sumberdaya Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	6
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	17
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	18
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan	27
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan	28
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan	29
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	30
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	32
BAB VII PENUTUP	33

BAB I

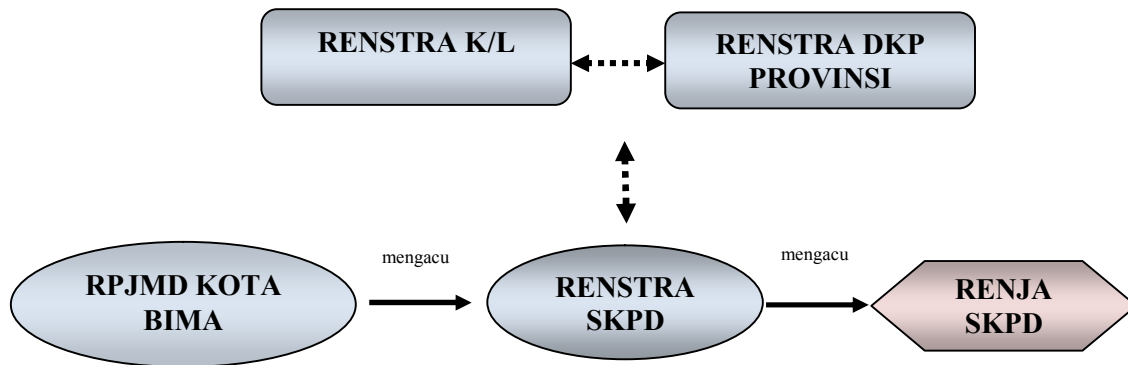
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Bima yang memasuki usia ke enam belas tahun senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pembangunan di segala bidang termasuk bidang kelautan dan perikanan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan tentram dalam membangun daerah. Titik awal pelaksanaan pembangunan yang baik tentunya harus dimulai dengan perencanaan yang baik, aspiratif serta berjenjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah merupakan penjabaran teknis di bidang kelautan dan perikanan dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prioritas, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Bima, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Renstra Kementerian/Lembaga).

Keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima 2014, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima 2013-2018, RPJMD Pemerintah Kota Bima 2013-2018, Renstra Dinas tingkat Provinsi, dan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan tercermin pada kebijakan ekonomi pembangunan daerah yang diarahkan pada upaya pengembangan perekonomian yang berorientasi global. Pengelolaan dan pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam harus dilakukan secara terpadu, lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumberdaya yang dimiliki.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama kurun waktu lima tahunan (2018-2023). Selain itu Renstra disusun sebagai acuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dinas selama kurun waktu tersebut. Adanya penetapan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjamin tercapainya kondisi yang diinginkan serta mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Bima dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai acuan penyusunan Renstra ini, ditetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2 Sumberdaya Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB.V STRATEGIS DAN ARAH KEBIKAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Permerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan.

Sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi di lingkup dinas;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Penangkapan;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan; dan
 - c. Seksi Kenelayanan.
5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
 - b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Seksi Sistem Logistik.

Adapun uraian tugas dan fungsi sekretariat dan tiap-tiap bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Bima adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Adapun fungsi sekretariat yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pelaksanaan fungsi dan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dengan tugas dan fungsi :

- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
 - i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya. Adapun fungsi bidang perikanan budidaya yaitu :
- a. Perumusan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan budidaya;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
 - f. Pelaksanaan pelaporan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan usaha budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi produksi dan usaha budidaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi usaha budidaya, dan peningkatan produksi budidaya perikanan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan usaha budidaya perikanan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan produksi, penerapan teknologi, serta peningkatan usaha budidaya perikanan;
- e. Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
- f. Pengembangan dan pengelolaan data statistik perikanan budidaya;
- g. Penertiban rekomendasi perizinan SIUP pembudidaya ikan dan penyiapan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
- h. Pengelolaan dan pemberdayaan usaha budidaya ikan skala kecil;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan usaha budidaya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbenihan dan pakan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi pembenihan dan pakan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembenihan dan pakan;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembenihan dan pakan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan teknologi, peningkatan usaha perbenihan dan pakan;
- e. Penyusunan bahan rencana pengembangan perbenihan ikan;
- f. Pembinaan kelompok usaha pembenihan ikan;
- g. Pelaksanaan pola penggunaan pakan alami serta teknologi pakan ikan;

- h. Penyelenggaraan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
 - i. Penyusunan laporan di bidang perbenihan dan pakan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2.3 Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya. Dengan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - e. Pelaksanaan eradikasi dan pengendalian penggunaan obat ikan yang berbahan kimia dan biologi;
 - f. Pembinaan dan pengembangan dalam rangka penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
 - g. Penyusunan bahan rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
 - h. Penyusunan pengawasan dan menjalin koordinasi terhadap distribusi induk dan benih ikan;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap. Adapun fungsi bidang perikanan tangkap yaitu :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayaan;
 - b. Penyiapan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan tangkap;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayaan;

- d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
- g. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
- h. Pelaksanaan penertiban rekomendasi penertiban izin di bidang perikanan tangkap; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

3.1 Seksi Usaha Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi usaha penangkapan ikan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka usaha penangkapan dan pengendalian sumber daya ikan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- e. Pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan;
- g. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan secara berkelanjutan;
- h. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana penangkapan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi prasarana dan sarana penangkapan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan sarana penangkapan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penangkapan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan prasarana dan sarana penangkapan;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- f. Pelaksanaan pencatatan, penandaan dan penomoran kapal perikanan;
- g. Pelaksanaan kaji terap teknologi penangkapan ikan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana penangkapan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Kenelayanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi kenelayanan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kenelayanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup kenelayanan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan kenelayanan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup kenelayanan;
- e. Inventarisasi dan identifikasi terhadap kebutuhan nelayan;
- f. Pemberdayaan kenelayanan;
- g. Pengoordinasian informasi kondisi iklim dan cuaca untuk kebutuhan pelayaran;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kenelayanan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Adapun fungsi bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yaitu :

- a. Perumusan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;

- b. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- d. Pelaksanaan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- g. Pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 4.1 Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi akses pasar, promosi dan investasi. Dengan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi akses pasar, promosi dan investasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup akses pasar, promosi dan investasi;
 - c. Penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akses pasar, promosi dan investasi;
 - d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup akses pasar, promosi dan investasi;
 - e. Penyiapan prasarana dan saranan untuk inventarisasi potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap akses pasar dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor;
 - g. Pengoordinasian informasi pasar;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang akses pasar, promosi dan investasi; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 4.2 Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan yang berkaitan dengan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan . Dengan fungsi :

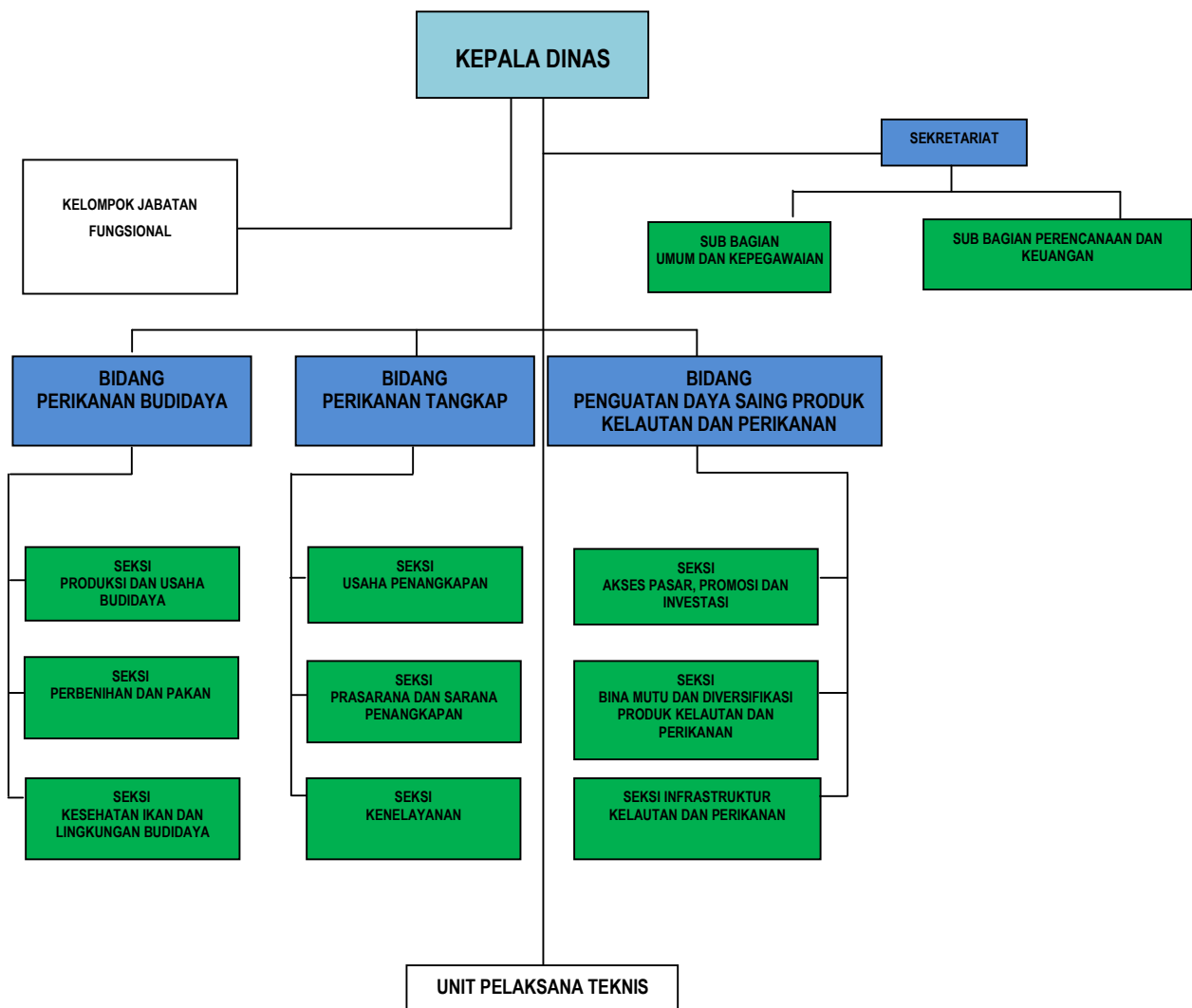
- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- b. Pengeordinasi dan sinkronisasi lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- f. Pengawasan terhadap keamanan produk kelautan dan perikanan;
- g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Sistem Logistik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan sistem logistik. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi sistem logistik;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan sistem logistik;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sistem logistik;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sistem logistik;
- e. Menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun kemitraan dan kelancaran distribusi logistik perikanan;
- f. Pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna dalam rangka sistem logistik;
- g. Menjalin komunikasi dan informasi untuk kebutuhan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang logistik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dapat dilihat pada Gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

2.2 Sumberdaya Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 50 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 orang, tenaga honor/kontrak sebanyak 12 orang dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 6 orang. Adapun rincian ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah ASN berdasarkan jabatan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Kepala Seksi	9
6	Staf	16
Jumlah		31

2. Jumlah ASN menurut golongan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina TK I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	5
4	Penata TK I	III/d	11
5	Penata	III/c	8
6	Penata Muda TK I	III/b	1
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur TK I	II/d	-
9	Pengatur	II/c	3
10	Pengatur Muda TK I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			31

3. Jumlah ASN menurut pendidikan terakhir per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Strata II	5
2	Strata I	23
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	-
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SLTA	2
8	SLTP	1
9	SD	-
Jumlah		31

2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima antara lain :

- a. Kantor dinas.
- b. Perlengkapan kantor baik Meubelair maupun peralatan elektronik
- c. Kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2.
- d. Gudang Pendingin (*Cold Storage*) dan sarana pendukungnya.
- e. *Solar Packet Dealer* untuk Nelayan (SPDN).
- f. Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
- g. Pabrik es dan sarana pendukungnya.
- h. Kapal penangkap ikan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) menunjukkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan indikator sasaran pada Renstra Tahun 2013-2018 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama 5 tahun masa pembangunan, namun secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

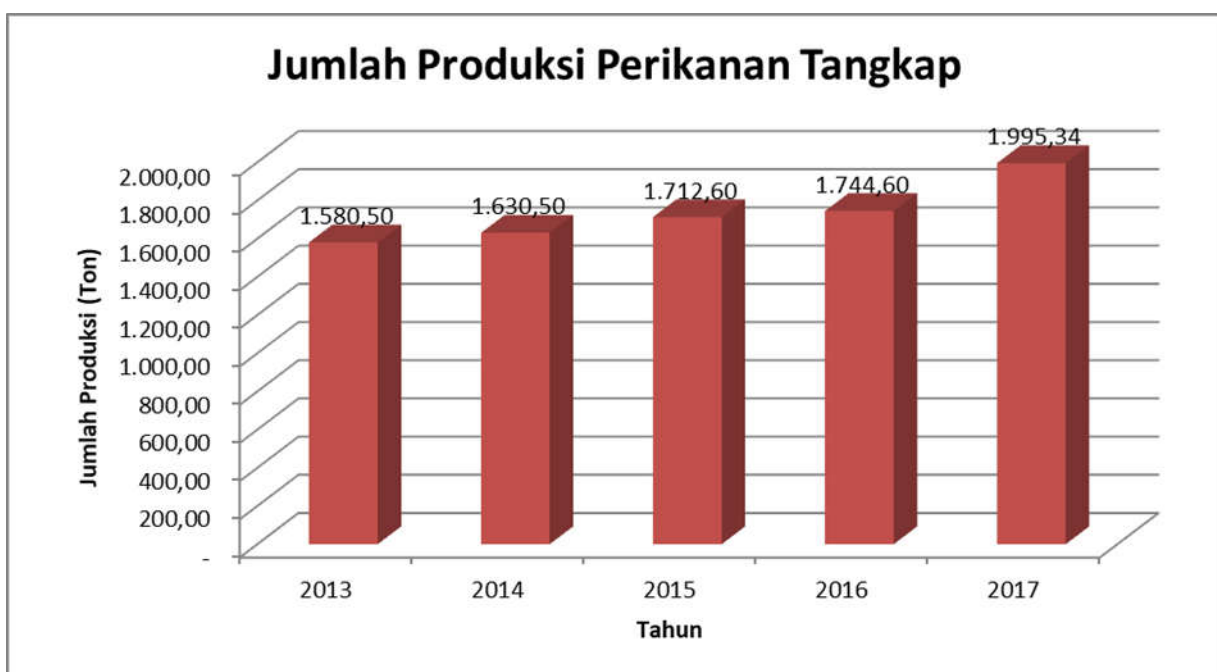
1. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

a. Pencapaian Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap di Kota Bima cenderung stabil atau menunjukkan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Perkembangan produksi perikanan tangkap pertahun dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Tahun	JUMLAH PRODUKSI (Ton)
2013	1.580,50
2014	1.630,50
2015	1.712,60
2016	1.744,60
2017	1.995,34
2018	0



Gambar 1. Grafik Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2013-2017

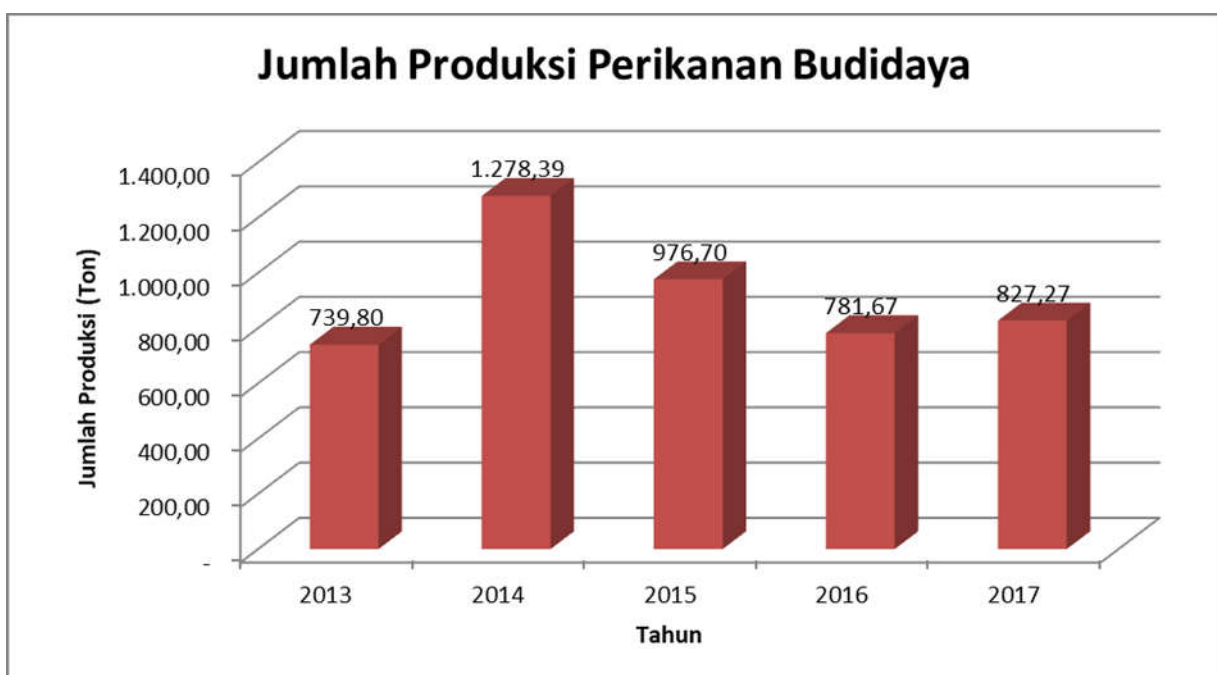
b. Pencapaian Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya di Kota Bima pada tahun 2014 mengalami peningkatan, Peningkatan produksi lele terjadi karena adanya dukungan dari pemerintah kota terkait dengan pengadaan kolam terpal bagi kelompok budidaya serta adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) budidaya. cukup tinggi, Produksi Perikanan Budidaya 2016 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena banjir bandang. Perkembangan

produksi perikanan budidaya pertahun dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut :

CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Tahun	JUMLAH PRODUKSI (Ton)
2013	739,80
2014	1.278,39
2015	976,70
2016	781,67
2017	827,27
2018	0



Gambar 2. Grafik Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2013-2017

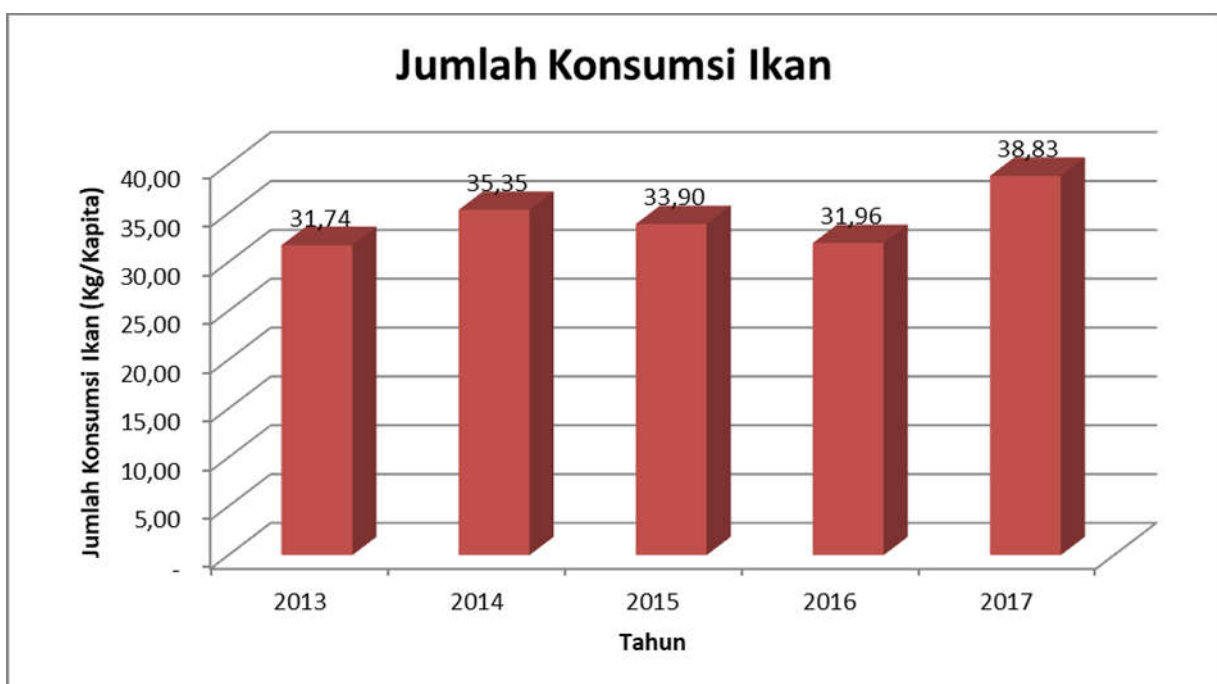
c. Pencapaian berdasarkan tingkat konsumsi ikan

Capaian Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima pada Tahun 2017 adalah sebesar 38,83 kg/kapita/thn. Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima cenderung meningkat atau menunjukkan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2013, hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran seperti penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil yang bersumber dari DAK (pengadaan sarana pengeringan, pengolahan serta peralatan pemasaran sederhana) serta adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) P2HP.

Perkembangan tingkat konsumsi ikan pertahun dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

CAPAIAN BERDASARKAN TINGKAT KONSUMSI IKAN

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg Per Kapita)
2013	31,74
2014	35,35
2015	33,90
2016	31,96
2017	38,83
2018	0



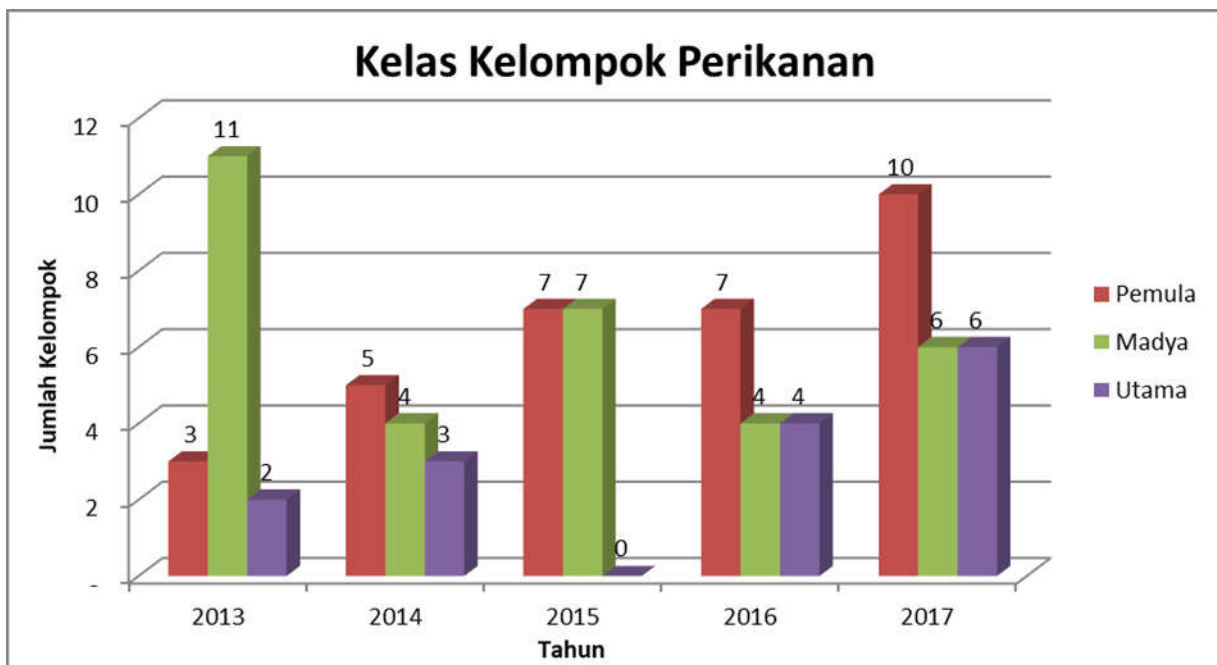
Gambar 3. Grafik Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013-2017

- d. Pencapaian berdasarkan peningkatan kelas kelompok perikanan

Pencapaian berdasarkan jumlah kelompok perikanan menunjukkan trend yang positif. Untuk kelas pemula terus mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif. Perkembangan jumlah kelompok perikanan pertahun dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

CAPAIAN BERDASARKAN PENINGKATAN KELAS KELOMPOK PERIKANAN

Tahun	Jumlah Kelompok		
	Pemula	Madya	Utama
2013	3	11	2
2014	5	4	3
2015	7	7	0
2016	7	4	4
2017	10	6	6
2018			



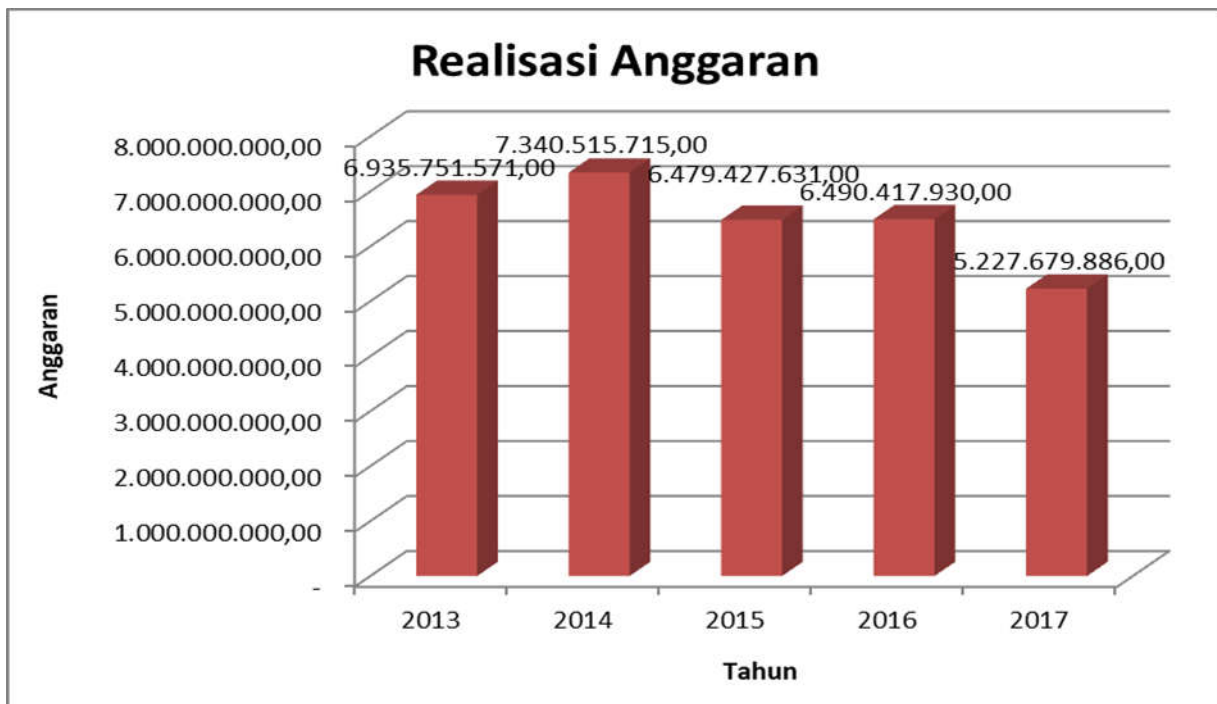
Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Kelas Kelompok

2. Capaian Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini dimungkinkan oleh masuknya anggaran dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan penurunan anggaran yang terjadi pada periode Tahun 2017. Hal ini dimungkinkan oleh bencana alam yang terjadi sehingga berimbas pada rasionalisasi anggaran. Perkembangan capaian kinerja keuangan secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut :

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp.)
2013	6.935.751.571
2014	7.340.515.715
2015	6.479.427.631
2016	6.490.417.930
2017	5.227.679.886
2018	0



Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

(1)	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	NO	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				1.580,50 Ton	1.675,33 Ton	1.775,85 Ton	1.882,40 Ton	1.995,34 Ton	1.580,50 Ton	1.630,50 Ton	1.712,60 Ton	1.744,60 Ton	1.995,34 Ton	100 %	97,32 %	96,44 %	92,68 %	100 %
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				739,80 Ton	791,59 Ton	847,00 Ton	897,82 Ton	951,69 Ton	739,80 Ton	1.278,39 Ton	976,70 Ton	781,67 Ton	827,27 Ton	100 %	161 %	115 %	87,06 %	86,93 %
3	Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)				31,74 kg/kapita /tahun	29,04 kg/kapita /tahun	32,54 kg/kapita /tahun	35,79 kg/kapita /tahun	39,37 kg/kapita /tahun	31,74 kg/kapita /tahun	35,35 kg/kapita /tahun	33,90 kg/kapita /tahun	31,96 kg/kapita /tahun	38,83 kg/kapita /tahun	100 %	122 %	104 %	89,30 %	98,63 %
4	Jumlah Kelompok :																		
	4.1 Pemula				0 klpk	5 klpk	15 klpk	7 klpk	8 klpk	3 klpk	5 klpk	7 klpk	7 klpk	10 klpk	100 %	100 %	46,67 %	100 %	125 %
	4.2 Lanjut				14 klpk	2 klpk	3 klpk	4 klpk	5 klpk	11 klpk	4 klpk	7 klpk	4 klpk	6 klpk	100 %	200 %	233 %	100 %	120 %
	4.3 Madya				4 klpk	2 klpk	3 klpk	4 klpk	5 klpk	2 klpk	3 klpk	0 klpk	4 klpk	6 klpk	100 %	150 %	0 %	100 %	120 %
5	Jumlah area pesisir yang direhabilitasi				1 titik	1 titik	0 titik	0 titik	1 titik	1 titik	0 titik	0 titik	0 titik	1 titik	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
6	Jumlah kasus pelanggaran				1 titik	1 titik	1 titik	1 titik	1 titik	0 titik	0 titik	0 titik	0 titik	0 titik	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	165.000.000	200.000.000	254.000.000	3.04.000.000	270.000.000	166.681.300	186.009.500	269.416.500	234.965.750	212.562.500	101,02	93,00	106,07	77,29	78,73	0,14	0,09
Belanja																	
Langsung	7.010.995.153	7.412.724.209	6.546.811.552	6.533.138.756	5.368.013.784	6.935.751.570	7.340.515.715	6.479.427.631	6.490.417.930	5.227.679.886	98,93	99,03	98,97	99,35	97,39	-0,080	-0,830
Jumlah	7.175.995.153	7.612.724.209	6.800.811.552	6.836.138.756	5.638.013.784	7.102.432.870	7.526.525.215	6.748.844.131	6.725.383.680	5.440.242.386	99,97	92,58	99,45	94,54	99,66	0,08	0,028

Berdasarkan realisasi belanja langsung dan dan Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama periode lima tahun sebelumnya yaitu Tahun 2013-2017, terlihat bahwa realisasi keuangan secara keseluruhan menunjukkan hasil memuaskan yaitu rata-rata di atas 90 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Bima yaitu :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
- c. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan untuk kegiatan non sektor perikanan;
- d. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB serta higienitas dalam pengolahan hasil kelautan dan perikanan;

Peluang

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Bima yaitu :

- a. Permintaan pasar terhadap produk hasil kelautan dan perikanan cukup tinggi baik dalam bentuk segar maupun olahan
- b. Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan semakin meningkat
- c. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan cukup tinggi;
- d. Tingkat sosialisasi dan promosi hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi
- e. Akses permodalan melalui lembaga keuangan bagi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan semakin dipermudah.

BAB III

PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana tugas dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi pada sektor kelautan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan serta mutu dan kualitas hasil kelautan dan perikanan baik segar maupun olahan. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, maka dapat dijelaskan permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
2. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan untuk kegiatan non sektor perikanan;
3. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB serta higienitas dalam pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan/hambatan yang ada. Dalam kurun lima tahun ke depan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara semua pihak yang peduli dengan sektor kelautan dan perikanan di Kota Bima dimana keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan sepanjang masa.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Adapun Visi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2018-2023 yaitu :

“Mewujudkan Kota Bima Yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat Maju Dan Mandiri”

Visi tersebut di atas mengandung makna dan arti sebagai berikut:

- a. **Kota Bima yang Berkualitas** memiliki makna terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. **Setara** merupakan singkatan dari beberapa kata yaitu **masyarakat sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Lingkungan Perkotaan yang Ramah dan Masyarakat Agamais**. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :
 - Masyarakat Sejahtera yaitu suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.
 - Trasnparan yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
 - Akuntabilitas yaitu Proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - Lingkungan Perkotaan yang Ramah yaitu lingkungan kota yang memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumberdaya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.

- Masyarakat Agamais yaitu masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, dan memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi. Adapun misi pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 ada 5 (lima) yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing** dengan maksud mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komprehensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan;
2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan** dengan maksud adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang sungguh-sungguh bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan nilai-nilai efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif** mempunyai maksud melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan efektifitas capaian hasil pembangunan, efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. **Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana** dimaksudkan agar terwujudnya lingkungan kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta meningkatkan vitalitas, sumberdaya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan resiko bencana;
5. **Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais** dimaksudkan agar terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Program pembangunan bidang kelautan dan perikanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah semestinya seiring, sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional. Keberhasilan program pemerintah daerah adalah cerminan dari keberhasilan program pemerintah pusat.

Adapun visi, misi dan sasaran strategis kementerian adalah sebagai berikut :

VISI

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Visi tersebut di atas mengandung makna dan arti sebagai berikut:

- a. Mandiri dimaksudkan kedepan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
- b. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

- c. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari.
- d. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI

Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yaitu :

1. Kedaulatan yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.
2. Keberlanjutan yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya.
3. Kesejahteraan yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis KKP yaitu :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif.
5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif .
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian.
8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses.
9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada

Layanan Prima.

10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kota serta kementerian saja melainkan juga mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintahan tingkat provinsi. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) provinsi dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Bima berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi beserta Faktor Pendorong dan Penghambat
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya - Kurang Tersedianya benih ikan unggul - Adanya serangan penyakit pada ikan/udang - Kurangnya sarana dan prasarana budidaya dan penangkapan ikan - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI. - Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit Ikan - Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit Ikan - Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan sertifikasi CBIB bagi pembudidaya ikan - Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan - Pemberian bantuan sarana prasarana budidaya - Pemberian alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan modern
2	Meningkatnya mutu dan hasil olahan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas dan nilai jual dari produk olahan hasil perikanan - Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana - Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan - Sebagian besar hasil produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar maupun sertifikasi halal - Kurangnya keterampilan dan pengetahuan bagi pengusaha/ POKLAHSAR hasil perikanan untuk melaksanakan prinsip pengolahan ikan yang baik dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya pelaku usaha pengolahan ikan yang berminat untuk mendapatkan pelatihan - Fasilitasi terhadap pengolah ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT dan sertifikat Halal - Giat melaksanakan pendampingan dan bimtek dan pelatihan peningkatan nilai tambah dan jumlah produk olahan hasil perikanan dan diversifikasi jenis olahan perikanan di Kota Bima

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan NTB	Belum tercapainya standar produksi untuk ekspor baik dari produk perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Terbatasnya jumlah produksi Karena peralatan yang digunakan masih sederhana	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pemberian sarana prasarana pendukung produksi - Pendampingan dan bimbingan yang rutin baik untuk nelayan, POKDAKAN maupun POKLAHSAR
4	Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan yang akurat sepanjang tahun			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi petugas dalam mencacah dan mengolah data-data sumberdaya kelautan dan perikanan
5	Meningkatnya jumlah SDM yang berkualitas yang mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan	Adanya mutasi dan perpindahan staf teknis maupun pejabat terkait sehingga mengurangi tingkat kinerja SKPD	Kurangnya ASN tenaga teknis kelautan dan perikanan	Adanya Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dari KKP yang sangat membantu untuk teknis lapangan
6	Berkembangnya usaha ekonomi perikanan	Kurangnya modal usaha	Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, keterampilan, maupun jaringan dan informasi pemasaran	Adanya dukungan berupa bantuan dari dinas maupun dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menunjang dan merangsang minat berusaha bagi pelaku usaha perikanan di Kota Bima.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Terjaga dan pulihnya sumberdaya kelautan dan perikanan	Adanya kegiatan reklamasi dan alih fungsi lahan	Rendahnya kesadaran masyarakat pesisir dalam keikutsertaan mengelola sumber daya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang - Memberikan Pengarahan dan pendampingan mengenai betapa pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan - Adanya UPT Pengawasan DKP Provinsi NTB di Kota Bima serta POKMASWAS
8	Terkendalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan tata ruang dan daya dukung lingkungannya	Kewenangan laut sudah menjadi kewenangan provinsi dan kementerian	Terkendala regulasi yang ada	Adanya UPT Pengawasan DKP Provinsi NTB di Kota Bima
9	Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kewenangan laut sudah menjadi kewenangan provinsi dan kementerian	Terkendala regulasi yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya UPT Pengawasan DKP Provinsi NTB di Kota Bima - Pendampingan dan pembinaan terhadap nelayan senantiasa dilakukan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Berdasarkan pada PERDA Nomor 4 Tahun 2012 khususnya pada paragraf 15 pasal 42

menyebutkan bahwa rancangan tata ruang wilayah untuk kawasan perikanan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf o meliputi: perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan;
2. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara;
3. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Dodu, Matakando, Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan Panggi;
4. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu dan Tanjung.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan air payau dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara;			
2.	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya dilakukan di Kelurahan Dodu, Matakando, Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan Panggi;			
3.	Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu dan Tanjung.			

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui masalah lingkungan hidup yang paling menonjol di Kota Bima.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup di Kota Bima.
3. Untuk menyusun cara pengelolaan masalah lingkungan hidup tersebut
4. Untuk mengetahui sudah terintegrasi tidaknya masalah lingkungan dalam kebijakan, rencana dan program
5. Untuk merumuskan alternatif kebijakan rencana dan program yang dapat diusulkan dalam menangani masalah lingkungan tersebut

Berdasarkan dokumen KLHS termuat sasaran strategis dalam bidang perikanan yaitu “Meningkatnya produksi hasil perikanan dan tercapainya usaha-usaha pelestarian sumber daya perikanan dan laut, pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan”.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan penjabaran RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, permasalahan pembangunan yang dihadapi pada periode sebelumnya dan yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun-tahun berikutnya untuk ditangani dan diselesaikan selama kurun waktu Tahun 2013-2018 khususnya yang berkaitan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pesisir Kota Bima dimulai dari Pintu Gerbang Ni'u (Kelurahan Dara) hingga pantai Kolo/So Ati (Kelurahan Kolo) Kota Bima perlu mendapat dukungan yang berarti baik dalam hal perencanaan maupun dalam implementasi melalui pembiayaan APBD maupun APBN.
2. Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, keterampilan, maupun jaringan dan informasi pemasaran.
3. Pengembangan industri olahan berbasis perikanan masih kurang diperhatikan baik perencanaan maupun pendanaannya.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan**

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	6 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
1	Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan										
	Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan	61.333,89 0.000	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan :	3.123,85 Ton	2.975,89 Ton	3.018,00 Ton	3.059,02 Ton	3.100,61 Ton	3.142,80 Ton
					1. Produksi Perikanan Tangkap	2.115,06 Ton	2.136,21 Ton	1.882,40 Ton	1.995,34 Ton	2.115,06 Ton	2.115,06 Ton
					2. Produksi Perikanan Budidaya	1.008,79 Ton	839,68 Ton	849,75 Ton	858,25 Ton	866,83 Ton	875,50 Ton
				Meningkatnya daya saing Produk perikanan	1. Jumlah Produk Olahan hasil perikanan	1.008,79 ton	843,00 ton	859,86 ton	877,06 ton	894,60 ton	912,49 Ton
					2. Angka Konsumsi Ikan per kapita per tahun	43,31 Kg/kapita / thn	39,92 Kg/kapita / thn	40,99 Kg/kapita / thn	42,65 Kg/kapita / thn	45,20 Kg/kapita / thn	47,80 Kg/kapita / thn

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	6 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
				Meningkatnya Kualitas dan kuantitas masyarakat kelautan dan perikanan	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan :	21 Klpk	19 Klpk	20 Klpk	21 Klpk	21 Klpk	21 Klpk
					a. Kelompok utama	9 Klpk	10 Klpk	10 Klpk	11 Klpk	10 Klpk	10 Klpk
					b. Kelompok madya	6 Klpk	4 Klpk	6 Klpk	5 Klpk	6 Klpk	6 Klpk
					c. Kelompok utama	6 Klpk	5 Klpk	4 Klpk	5 Klpk	5 Klpk	5 Klpk

Tabel 4.2

**Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima 2018-2023**

MISI 2 Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan				Rancangan Awal RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023
TUJUAN Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif				
SASARAN Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan				
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap 2. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	1. Bidang Perikanan Tangkap 2. Bidang Perikanan Budidaya
		2. Meningkatkan daya saing produk perikanan	1. Persentase Produk Olahan Hasil Perikanan 2. Angka Konsumsi Ikan per kapita per tahun	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		3. Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase kelompok berkualifikasi	Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

BAB V**SATRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1**Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kota Bima yang Mandiri, Berkualitas yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”			
Misi ke-2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
	Meningkatkan Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi pembinaan, pelatihan dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Pembinaan, sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Perumusan Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2018-2023 tidak secara otomatis dapat disusun dari RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah bagian dari Kota Bima yang sifatnya “*dependent*” artinya tergantung dari RENSTRA Kota Bima dan RENSTRA Provinsi maupun Pusat. Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan program lanjutan Tahun 2013-2018, dimana program dan kegiatan ini didistribusikan pada setiap bidang yang ada pada Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang PDSPKP dan Sekretariat. Namun demikian dalam melaksanakan strategi perlu disesuaikan dengan permasalahan dan tugas bagian dan sub bagian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

Secara ringkas rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Pengadaan Pakaian Olahraga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

6. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

- Koordinasi Hari Nusantara

7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
- Pengadaan Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut Metode Long Line & Rakit Apung
- Pembangunan/Rehab Sarana & Prasarana Fisik UPR & HSRT
- Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Perikanan Budidaya
- Revitalisasi Kelompok Perikanan Budidaya
- Pemantauan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Budidaya

8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pendampingan pada Kelompok Nelayan perikanan tangkap
- Pengembangan Lembaga Usaha Perikanan Tangkap

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap
- Pendataan Kapal Perikanan Tangkap
- Pendampingan Perijinan Kapal Perikanan Lebih Kecil dari 7 GT
- Revitalisasi Kelompok Perikanan Tangkap
- Revitalisasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Ikan

9. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

- Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)
- Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Nelayan Andalan

10. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

- Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
- Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)
- Revitalisasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
- Pelatihan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan
- Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
- Peningkatan Akses Pasar, Promosi dan Investasi

Adapun rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dalam rentang lima tahun (2018-2023) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

Adapun indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan :	3.122,85 Ton	2.975,89 Ton	3.018,00 Ton	3.059,02 Ton	3.100,41 Ton	3.142,80 Ton	18.420,17 Ton
		a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.115,06 Ton	2.136,21 Ton	2.168,25 Ton	2.200,77 Ton	2.233,78 Ton	2.267,30 Ton	13,121,37 Ton
		b. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.008,79 Ton	839,68 Ton	849,75 Ton	858,25 Ton	866,83 Ton	875,5 Ton	5.298,80 Ton
2.	Terciptanya Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	2. Jumlah Produk olahan hasil perikanan	1.008,79 Ton	843,00 Ton	859,86 Ton	877,06 Ton	894,60 Ton	912,49 Ton	5.396 Ton
		3. Tingkat Konsumsi ikan per kapita per tahun	43,31 Kg/Kapita/Thn	39,92 Kg/Kapita/Thn	40,99 Kg/Kapita/Thn	42,65 Kg/Kapita/Thn	45,20 Kg/Kapita/Thn	47,80 Kg/Kapita/Thn	259,87 Kg/Kapita/Thn
		4. Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan :	21 Kelompok	19 Kelompok	20 Kelompok	21 Kelompok	21 Kelompok	21 Kelompok	123 Kelompok
3.	Tercapainya Peningkatan Kelas Kelompok Perikanan	a. Kelompok Pemula	9 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	11 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	60 Kelompok
		b. Kelompok Madya	6 Kelompok	4 Kelompok	6 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	33 Kelompok
		c. Kelompok Utama	6 Kelompok	5 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	30 Kelompok

BAB VIII

PENUTUP

Partisipasi aktif dari semua pihak merupakan salah satu pendukung pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023.

Lampiran

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima (Review)

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra SKPD	
									Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas akuntabilitas OPD	Nilai LKIP OPD	BB	Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi OPD	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100 %	558,938	100 %	630,244	100 %	723,955.756	100 %	796,351.331	100 %	885,986.464	100 %	3,595,475.657
						Kegiatan 1	Penyediaan jasa surat menyurat	600 surat	800 surat	19,242	800 surat	21,166	800 Surat	23,283	800 Surat	25,611.102	800 Surat	28,172.212	4,000 Surat	117,474.334
						Kegiatan 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100 %	39,400	100 %	43,340	100 %	47,674	100 %	52,441.400	100 %	57,685.540	500 Bln	240,540.940
						Kegiatan 3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26 Unit	24 Unit	27,720	24 Unit	31,878	24 Unit	36,660	24 Unit	40,325.670	24 Unit	44,358.237	120 Unit	180,941.607
						Kegiatan 4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Dok	1 Org	85,996	1 Org	98,895	1 Org	113,730	1 Org	125,102.681	1 Org	137,612.949	5 Org	561,336.740
						Kegiatan 5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20 Unit	20 Unit	23,000	20 Unit	26,450	20 Unit	30,418	20 Unit	33,459.250	20 Unit	36,805.175	100 Unit	150,131.925
						Kegiatan 6	Penyediaan alat tulis kantor	2606 buah	2,037 bh	28,301	2,500 bh	32,546	2,700 bh	37,428	3,000 bh	41,170.880	3,500 bh	45,287.968	13,737 bh	184,734.070
						Kegiatan 7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43,000 Lbr	45,276 Lbr	20,719	80,000 Lbr	24,000	100,000 Lbr	30,000	100,000 Lbr	33,000	100,000 Lbr	36,300	425,276 Lbr	144,019
						Kegiatan 8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1 bh	8,500	- bh	-	- bh	-	- bh	-	1 bh	10,000	2 bh	18,500
						Kegiatan 9	Penyediaan makanan dan minuman	1700	1590 Bln	23,850	1,700 Bln	27,428	2,000 Bln	31,542	2,300 Bln	34,695.788	2,500 Bln	38,165.366	10,090 Bln	155,680.279
						Kegiatan 10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40	40 Dok	252,210	40 Dok	290,041	40 Dok	333,547	40 Dok	366,902.1	40 Dok	403,592.267	200 Bln	1,646,292.512
						Kegiatan 11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	10	10 Dok	30,000	10 Dok	34,500	10 Dok	39,675	10 Dok	43,642.50	10 Dok	48,006.750	50 dok	195,824.250

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		
									Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra SKPD								
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional	100%	100	%	551,690	100	%	433,086	100	%	222,049	100	%	488,288	100	%	493,117	100	%	2,188,230	
						Kegiatan 1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan gedung kantor	0	2	Unit	370,000	1	Unit	200,000	-	Unit	-	1	Unit	200,000	-	Unit	220,000	4	Unit	990,000.000	
						Kegiatan 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional baru yang tersedia	-	0		-	2	Unit	40,000		Unit	-	2	Unit	40,000		Unit	-	4	Unit	80,000	
						Kegiatan 3 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor	199	241	Buah	12,850	250	bh	14,778	250	Buah	16,994	250	Buah	18,693.538	250	Buah	20,562.891	1,241	Bln	83,878	
						Kegiatan 4 Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor	8	4	Unit	22,750	6	Unit	46,163	6	Unit	53,087	6	Unit	61,049.906	6	Unit	67,154.897	28	Unit	250,204	
						Kegiatan 5 Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersediannya	19	56	Unit	52,050	6	Unit	24,000	6	Unit	27,600	6	Unit	31,740.000	6	Unit	34,914.000	80	Unit	170,304	
						Kegiatan 6 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Ruang Kantor yang terpelihara	10	10	bh	29,340	11	bh	33,741	12	bh	38,802	12	bh	42,682.365	12	bh	46,950.602	57	bh	191,516	
						Kegiatan 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	29	29	unit	64,700	29	Unit	74,405	29	Unit	85,566	29	Unit	94,122	29	Unit	103,535	145	Unit	422,328	
			Meningkatkan disiplin aparatur	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	persentase aparatur yang mendapatkan sanksi disiplin	100%	100	%	42,800	100	%	30,000	100	%	60,000.000	100	%	35,000.000	100	%	130,542.969	100.000	%	298,343	
						Kegiatan 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	49	Stel		50	Stel	30,000			54	Stel	35,000.0	58	Stel	61,543	162	Stel	126,543			
						Kegiatan 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	49	50	Stel	27,400	-	-	50	Stel	40,000	-	-	-	52	Stel	46,000	152	stel	113,400		
						Kegiatan 3 Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	0	49	Stel	15,400	-	-	50	Stel	20,000	-	-	-	52	Stel	23,000	151	stel	58,400		
			Meningkatkan kualitas kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Perautran Perundang undangan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan dan perundang-undangan	100	100	%	16,997	100	%	19,547	100	%	22,478.533	100	%	24,726	100	%	27,199	500	Org	110,947	
						Kegiatan 1 Sosialisasi Peraturan Peundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang undangan	50	Org	50	Org	16,997	50	Org	19,547	50	Org	22,479	50	Org	24,726	50	Org	27,199	250	Org	110,947

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100 %	144,300	100 %	243,320	100 %	279,818.000	100 %	307,800	100 %	338,580	100.000 %	1,313,818
						Kegiatan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	26,800	1 Dok	30,820	1 Dok	35,443	1 Dok	38,987	1 Dok	42,886	5 Dok	174,936
						Kegiatan 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dok	1 Dok	16,000	1 Dok	33,500	1 Dok	38,525	1 Dok	42,378	1 Dok	46,615	5 Dok	177,018
						Kegiatan 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	8,500	1 Dok	17,500	1 Dok	20,125	1 Dok	22,138	1 Dok	24,351	5 Dok	92,614
						Kegiatan 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	13,500	1 Dok	17,500	1 Dok	20,125	1 Dok	22,138	1 Dok	24,351	5 Dok	97,614
						Kegiatan 5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dok	4 Dok	53,500	4 Dok	90,000	4 Dok	103,500	4 Dok	113,850	4 Dok	125,235	20 Dok	486,085
						Kegiatan 6 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja yang terselesaikan	2 Dok	2 Dok	26,000	2 Dok	54,000	2 Dok	62,100	2 Dok	68,310	2 Dok	75,141	10 Dok	285,551
						Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Nusantara	1 KI	1 KI	21,121	1 KI	23,233	1 KI	25,556	1 KI	28,112	1 KI	30,923	5 KI	128,946
						Kegiatan 1 Koordinasi Hari Nusantara	Cakupan koordinasi hari nusantara	1 KI	1 KI	21,121	1 KI	23,233	1 KI	25,556	1 KI	28,112	1 KI	30,923	5 KI	128,946

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke-2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan																				
Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD																
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan	61,333,890,000	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya		Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	1,008.79	839.680 Ton	737,578	849.750 Ton	1,422,937	858.250 Ton	1,491,089	866.830 Ton	1,760,198	875.500 Ton	1,951,218	4,290.010 Ton	7,363,019
						Kegiatan 1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah bibit ikan unggul yang tersedia untuk kelompok	340,000	111.530 Ekor	140,858	750,000 Ekor	250,000	750,000 -	300,000	800,000 Ekor	350,000	800,000 Ekor	400,000	3,100,112 ekor	1,440,858
						Kegiatan 2 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok tani pembudidaya ikan yang di dampingi	10	8 Kip	50,690	10 Kip	55,759	15 Kip	61,334.900	15 Kip	67,468	15 Kip	74,215	63	309,468
						Kegiatan 3 Pengadaan Sarana Pengembangan Kebun Rumpul Laut Metode Long Line & Rakit Apung	Jumlah kawasan rumput laut yang dikembangkan	1	0	-	2 Kebun	100,000	-	-	1 Kebun	100,000	1 Kebun	110,000	4 Kebun	310,000
						Kegiatan 4 Pembangunan/ Rehab Sarana & Prasarana Fisik UPR & HSRT	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR	0	50,000 ekor	188,850	100,000 ekor	217,178	150,000 ekor	249,754.125	150,000 ekor	274,729.538	200,000 ekor	302,202.491	650,000 ekor	1,232,714
						Kegiatan 5 Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Perikanan Budidaya	Jumlah sarana prasarana penunjang perikanan budidaya	12 Set	10 Set	357,180	15 Set	800,000	15 Set	880,000	15 Set	968,000	15 Set	1,064,800	70 Set	4,069,980
						Kegiatan 6 Revitalisasi Kelompok Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok yang di revitalisasi	0	10 Kip	50,000	12 Kip	55,000	14 Kip	60,500	15 Kip	66,550	17 Kip	73,205	68 Kip	305,255
						Kegiatan 7 Pemantauan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah Kali Pemantauan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Budidaya	0	2 Kali	18,448	2 Kali	20,000	4 Kali	24,000	4 Kali	26,400	4 Kali	29,040	16 Kali	117,888.000

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tujuan 1				Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	2115,06 Ton	2.136,21 Ton	1,872,205	2,168 Ton	2,157,256	2,201 Ton	2,387,737	2,233.78 Ton	2,643,479	2,267.30 Ton	2,917,124	8,870 Ton	11,977,800
						Kegiatan 1 Pendampingan pada kelompok nelayan	Jumlah nelayan yang mendapatkan kartu asuransi nelayan	50	1,000 Org	122,260	250 Org	140,599	250 Org	161,689	250 Org	185,942	250 Org	213,834	2,000 Org	824,323.532
						Kegiatan 2 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Jumlah lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap yang dikembangkan	3 klp	7 Klp	134,350	7 Klp	154,503	7 Klp	177,678	7 Klp	204,330	7 Klp	224,763	35 Klp	895,622
						Kegiatan 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Prasarana penunjang perikanan tangkap yang tersedia	231 unit	981 unit	1,615,595	500 2 Unit	1,777,155	500 4 Unit	1,954,869.950	500 Unit	2,150,356.945	500 Unit	2,365,392.640	2,981 Unit	9,863,369.035
						Kegiatan 4 Pendataan Kapal Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang terdata	-	50 unit	-	50 unit	35,000	50 unit	38,500.000	50 unit	42,350.000	50 unit	46,585.000	250 unit	162,435.000
						Kegiatan 5 Pendampingan Perijinan Kapal Perikanan Lebih Kecil dari 7 GT	Jumlah perijinan kapal yang di dampingi	-	50 unit	-	100 unit	30,000	100	33,000.000	100	36,300.000	100 unit	39,930.000	450 unit	139,230.000
						Kegiatan 6 Revitalisasi Kelompok Perikanan Tangkap	Peningkatan Kelas Kelompok	-	8 Klp	-	8 Klp	20,000	9 Klp	22,000	9 Klp	24,200	10 Klp	26,620	44 Klp	92,820
						Kegiatan 7 Revitalisasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Sumberdaya Ikan yang direhabilitasi	-	0 Kali	-	2 Kali	30,000	2 Kali	33,000	2 Kali	36,300	2 Kali	39,930	8 Kali	139,230
			Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase kelompok berkualitas		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah kelompok yang dibina untuk peningkatan Kelasanya	21 Klp	15 Klp	50,000	20 Klp	57,500	21 Klp	130,000	21 Klp	55,000	21 Klp	60,500	98 Klp	353,000
						Kegiatan 1 Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)	Jumlah Dokumen data statistik perikanan tersedia	1 Dok	1 dok	50,000	1 dok	57,500	1 dok	50,000	1 Dok	55,000	1 Dok	60,500	5 dok	273,000
						Kegiatan 2 Pelaksanaan PEDANA dan Kontak Tani Nelayan Andalan	Cakupan kontak tani nelayan	1 Kl	-	-	-	2 kali	80,000	- Kl	-	-	-	2 kali	80,000	

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke-2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan																				
			sasaran OPD Meningkatkan daya saing produk perikanan	IKU OPD Persentase Produk Olahan Hasil Perikanan		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produk olahan	1.008,79 Ton	843.00 Ton	18,515,883	859.86 Ton	38,102,000	877.06 Ton	67,731,500	894.60 Ton	114,268,425	912.49 Ton	125,646,565	4,387 Ton	364,220,098
				Angka Konsumsi Ikan per kapita per tahun		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun	43,31 Kg/Kapita/Thn	39.92 Kg/Kapita/Thn		40.99 Kg/Kapita/Thn		42.65 Kg/Kapita/Thn		45.20 Kg/Kapita/Thn		47.80 Kg/Kapita/Thn	216.56 Kg/Kapita/Thn		
						Kegiatan 1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah POKLAHSAR yang di dampingi	19	22 Klp	32,114	22 Klp	35,000	22 Klp	40,250,000	22 Klp	44,275	22 Klp	48,703	110 Klp	200,342
						Kegiatan 2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang tersedia	4	12 Set	201,990	10 Unit	250,000	10 1 Unit	275,000,000	10 Set	302,500	10 Unit	332,750	52 13 Unit	1,362,240
						Kegiatan 3 Penyelenggaraan Kegiatan Forum Kunsumsi Ikan (FORIKAN)	Jumlah Peserta Lomba Masak serba ikan (FORIKAN)	39	39 Peserta	196,033	37 Peserta	200,000	37 Peserta	220,000,000	37 Peserta	242,000,000	37 Peserta	266,200,000	187 Peserta	1,124,233
						Kegiatan 4 Revitalisasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok	0	0 Klp		5 klp	30,000	4 Klp	33,000,000	4 Klp	36,300,000	3 Klp	39,930,000	16 Klp	139,230
						Kegiatan 5 Pelatihan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0	0		40 Org	20,000	40 Org	22,000	40 Org	24,200	50 Org	26,620	170 Org	92,820
						Kegiatan 6 Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan	2 Pasar/UPI	5 Pasar/UPI (Unit Pengolahan Ikan)	55,340	7 Pasar/UPI (Unit Pengolahan Ikan)	50,000	9 Pasar/UPI (Unit Pengolahan Ikan)	55,000	11,000 Pasar/UPI (Unit Pengolahan Ikan)	60,500	13,000 Pasar/UPI (Unit Pengolahan Ikan)	66,550	45 Pasar/UPI (Unit Pengolahan Ikan)	287,390
						Kegiatan 7 Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana rantai dingin yang difasilitasi	0	3 Unit	50,390	3 unit	55,000	3 unit	60,500	3,000 unit	66,550	3,000 unit	73,205	15 unit	305,645
						Kegiatan 8 Peningkatan Akses Pasar, Promosi dan Investasi	Jumlah kegiatan akses pasar, promosi dan investasi	0	5 Kali	50,130	5 Kali	60,000	5 Kali	66,000	5 Kali	72,600,000	5 Kali	79,860,000	25 Kali	328,590

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
22	23
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	
DKP	

42
300
120
127.5
100
100
37.5
100
927

20
12
20
20
60
10
18
15
6
30
10
20
241